

DATAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Fida' Abdul Rafi'. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Republika. Jakarta. 2006.
- Achmad Badjuri et al., "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia)," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 1 (2011): 84–96, 90.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Cetakan Pertama. Konstitusi Press. Jakarta. 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. 2004.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), halaman 1-2.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016. hlm. 16.
- Denny Indrayana. *Jangan Bunuh KPK Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*. (Malang: Intrans Publishing, 2016), 57-58.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 254-25.

- Hans Kelsen, "*Teori Umum Hukum Dan Negara*," Judul Asli: *General Theory of Law and State*. Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Bee Media, 2007.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H.,M.C.I., Wakil Ketua MK*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Cetakan Kedua. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2004.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Edisi Revisi. Intrans Publishing. Jawa Timur. 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2017.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Cetaakan Kedua. Mandar Maju, Bandung. 2008.
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia*.Cetakan Pertama. Sinar Baru. Bandung. 1985.
- Kusumah M.W. *Tegaknya Supremasi Hukum*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 2001 hlm. 141.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019), 47-48.
- Mahfud, MD. *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 1.
- Musanef, Rosdakarya. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta. 2007.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, halaman 26.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 dan 6, Tahun XII*, September-Desember, 1997, hal 1.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 71.

Sedarmayanti, Good Governance “*Kepemimpinan Yang Baik*”, *Bagian Kedua (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Governance)*. Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 4-5.

Widjaja, A.W. *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali. Jakarta. 2006.

Zainal Arifin Mochtar, “*Lembaga Negara Independen*,” Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 47.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

Abdul Latif, “*Jaminan Uud 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 49–66, 51.

Ahmad Basarah, “*Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1–8.

Amanda Dea Lestari, Bustanuddin, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi : Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtvinding) Yang Progresif*. Limbago Journal Of Constitutionnal Law. Vol. 1. No 1. 2021. Hal 5.

Astika Nurul Hidayah, “*Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*,” *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137.

Bambang Dwi Baskoro, *Perseturuan KPK dan Polri dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, *Masalah-Masalah Hukum* 42, no.3 (2013): 336-345, 338, DOI: 10.14710/mmh.42.3.2013.336-345.

- Eddy Omar Sharif Hiarje, *United nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no.1 (2019): 112-125, 114, DOI: 10.22146/jmh.43968.
- Hendra Nurtjahjo, *“Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tin.Jauan Hukum Tata Negara,”* Jurnal Hukum & Pembangunan 35, no. 3 (2017): 275–287, 78, DOI: 10.21143/jhp.vol35.no3.1518.
- Hikmatus Syuraida, *“Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi,”* Avatara 3, no. 2 (2015).
- Julpikar, *“Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penetapan Dan Pengawasan Apbn Di Indonesia,”* De Lega Lata 1, no. 1 (2016): 162–183, 176.
- Idul Rishan, *“Batas Konstitusional Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi,”* Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 630–654, 640, DOI: 10.31078/jk1639.
- Idul Rishan, *“Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen,”* Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 10, no. 1 (2018): 44–64, 48, DOI: 10.28932/di.v10i1.1031.
- Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, *“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,”* Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 239–58.
- Luthfi Widagdo Eddyono, *“Independence Of The Indonesian Constitutional Court In Norms And Practices,”* Constitutional Review 3, no. 1 (2017): 71–97, 80, DOI: 10.31078/consrev314.
- Mahardika and Friman Wijaya, *Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Provinsi Dki Jakarta*, Jurnal Hukum Adigama 1, no. 2 (2019): 1-25, 2, DOI: 10.24912/adigama.vli2.2925
- Mei Susanto, *“Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat,”* Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 385–406, 389, DOI: 10.29123/jy.v11i3.326.

- Miranda Risang Ayu, “*Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions Dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*,” *Konstitusi Jurnal* 1, no. 1 (2009): 53.
- Mohamad Hidayat Muhtar, “*Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*,” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93, 70, DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1988.
- Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012, hal. 9.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, *Harmonisasi Norma Norma dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.
- Saldi Isra, “*Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*,” Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Sirajuddin and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Setara Press, 2015).
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 94.
- Sulardi and Irmayadi Sastra, “Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government),” *Jurnal Hukum Replik* 5, no. 2 (2017): 184–199, 187, DOI: 10.31000/jhr.v5i2.926.
- Wawan Heru Suyatmiko and Alvin Nicola, “Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2, 2019: 35–56, 36, DOI: 10.32697/INTEGRITAS.V5I2.465.

W M Herry Susilowati, “Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” Research Report-Humanities and Social Science 2 (2012).

C. Makalah

Putusan/Seminar/Diskus/Simposium/Lokakarya/Website

Adam Setiawan, (2019), *KPK di Ambang Kehancuran* (Kaltim Post, 16 September 2019) <https://kaltim.prokal.co/read/news/360951-kpk-di-ambang-kehancuran.html> di akses 16 september 2019.

Damang. *Pengertian kewenangan*. (Online). <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. Diakses 27 Desember 2022

Evi Fitriyani Aulia. *Kekuasaan dan Kewenangan*. (Online). <http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022

Inche Sayuna, *harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16.

Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Medika Pustaka Phoenix, Jakarta Barat, 2009, hal 60.

Majalah Parlementaria Edisi 151 Tahun 2017 hlm 13.

Nehru Asyikin, (2019), *Implikasi Hak Angket Dpr Ri Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUmenghilangkan XV/2017 (Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Hukum dan Politik)*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019).

Putera Astomo, “Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi,” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (2014): 577–599, 578.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PUU-1/2003 pada Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, h. 102.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Sri Soemantri Martosoewignjo, 2001, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Beragama*, Makalah disampaikan pada Stadium Generale dan Peringatan 40 Tahun Pengabdiannya di Universitas Padjadjaran Bandung, hlm.1.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>, diakses pada 08 januari 2022 , Penulis: Denita Matondang, Sumber: DetikNews, pukul 15.15 w ib.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi